

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN DI PTAI RESPONSIF GENDER

Nurhamdah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
nurhamdah@stainparepare.ac.id

Abstract:

Since gender mainstreaming has not been institutionalized in particular on policies, and program related to gender planning and budgeting become one factor of the gender gap issues. The aim of this article is to find out the gender gap issues budgeting on Islamic Institution. Therefore, it needs to be done on gender analysis of policy which its results are used as a reference to reformulate policy that describe equality and provide benefits for academic community both men and women at STAIN Parepare. The result showed that there were no gender gap issues in the program of “Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah”. This program has given students access to and participation in both men and women as users of development to be actively participate in the program. This also give control equally for both students to take apart in Tarbiyah program, thus the expected benefits attached to them as qualified students as mandated by the outcome of DIPA and RKAL STAIN Parepare.

Key words: Policy, Program and Gender Responsive

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur antara lain dengan Human Development Index (HDI), Gender-related Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dalam HDI Indonesia telah

menunjukkan adanya peningkatan 0,687 tahun 2004 menjadi 0,719 tahun 2008, sedangkan GDI Indonesia juga mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008 (KNPP dan BPS). Rendahnya nilai GDI dibandingkan HDI mengindikasikan masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Ini berarti masih besarnya perbedaan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di sisi lain, GEM Indonesia yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,623 (KNPP-BPS). Peningkatan nilai GEM yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, belum signifikan. Peningkatan GDI dan GEM yang belum signifikan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 177 negara. Di antara negara-negara ASEAN, GDI Indonesia termasuk yang paling rendah.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008, serta RPJMN 2010-2014 dimana salah satu prioritas pembangunannya adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peran serta, dan mendapatkan manfaat

dari hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, kesenjangan terhadap perempuan ataupun juga kesenjangan terhadap laki-laki.

Selama ini, pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil review literature menunjukkan bahwa isu gender masih menempati posisi marginal dalam pembangunan (Darwin dan Kusumasari, 2002). Hampir seluruh kebijakan publik yang kita miliki adalah netral gender namun bias gender pada implementasinya (Nugroho, 2000-2001). Bila dalam tataran kebijakan pusat saja masih kelihatan kesenjangan gendernya, maka dapat diasumsikan kesenjangan gender pada kebijakan di tataran lembaga pendidikan seperti PTAI kemungkinan besar juga terjadi. Belum lagi adanya keyakinan dari sebagian petinggi perguruan tinggi islam yang memandang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan sehingga lebih memilih partner kerja, mengangkat personil, atau memberi tugas dan kesempatan kepada laki-laki. Pada konteks STAIN Parepare, belum melembaganya pengarusutamaan gender khususnya dalam kebijakan, program, kegiatan terkait perencanaan dan penganggaran di lingkup lembaga menjadi salah satu faktor adanya isu kesenjangan gender. Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis gender pada suatu kebijakan yang hasilnya dijadikan bahan acuan lembaga untuk memformulasikan kembali kebijakan yang menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender sehingga hasil pembangunan di lingkup STAIN Parepare tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi dosen laki-laki maupun dosen

perempuan, karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan, mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa perempuan.

Berdasar latar belakang tersebut maka penelitian analisis kebijakan program kegiatan di Perguruan Tinggi Islam yang responsif gender ini membatasi kajiannya pada masalah yang berkaitan dengan kelembagaan yang meliputi kebijakan pimpinan, program, dan kegiatan di STAIN Parepare tahun anggaran 2011. Research questions pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana rumusan kebijakan yang dijabarkan pimpinan di lingkup STAIN Parepare? 2. Apakah program kegiatan yang dikembangkan telah menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender? 3. Apakah ada faktor kesenjangan gender dilihat dari akses, control, partisipasi, dan manfaat? 4. Bagaimana isi kesenjangan gender yang ada? 5. Bagaimana komitmen penentu kebijakan menuju perencanaan dan penganggaran responsive gender?

Pengarusutamaan Gender dan Perguruan Tinggi

Pengarusutamaan Gender yang lebih dikenal dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap

sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan control, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan (KPPPA, 2010)

Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang telah menetapkan 3 (tiga) pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tat kelola pemerintahan yang baik,

(3) pengarusutamaan gender (PUG). Ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional.

Begitu pentingnya pengarusutamaan gender dalam semua lini pembangunan nasional, sehingga pada Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2009 telah menghasilkan kesepakatan dan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi melalui Pusat Studi Wanita/Gender, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan langkah-langkah percepatan PUG. Salah satu hasil dari Rekomendasi Rakor PUG tersebut adalah peran Perguruan Tinggi melalui PSW/PSG dalam pelaksanaan PUG di daerah.

PSW/PSG sebagai bagian dari Perguruan Tinggi mempunyai peran dan tugas melaksanakan Tri-Darma Perguruan Tinggi. Untuk darma pertama, PSW/PSG diharapkan proaktif dalam mendorong terlaksananya pembelajaran berperspektif gender. Untuk darma kedua dan ketiga, PSW/PSG sebagai lembaga penelitian di PT

diharapkan dapat melakukan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan statistik gender terkait dengan pencapaian MGD's dan isu lokal. Untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender di daerah, PSW/PSG melakukan penelitian kebijakan baik yang sudah berjalan maupun penyusunan kebijakan yang baru dengan mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara adil. Sehingga sangat perlu dibangun kerjasama antara PSW/PSG dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil rekomendasi rakor tersebut di atas, sehingga peneliti sebagai bagian dari PSG STAIN Parepare merasa terpanggil untuk melakukan penelitian analisis kebijakan PT di lingkup STAIN sebagai langkah awal untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selain itu PSG STAIN Parepare melalui analisis kebijakan dan program kegiatan pada lembaga intern diharapkan dapat memberikan kontribusi menuju perencanaan dan penganggaran responsif gender. Semua unsur lembaga yakni dosen, karyawan, dan mahasiswa dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari semua kebijakan dan program kegiatan tanpa diskriminasi.

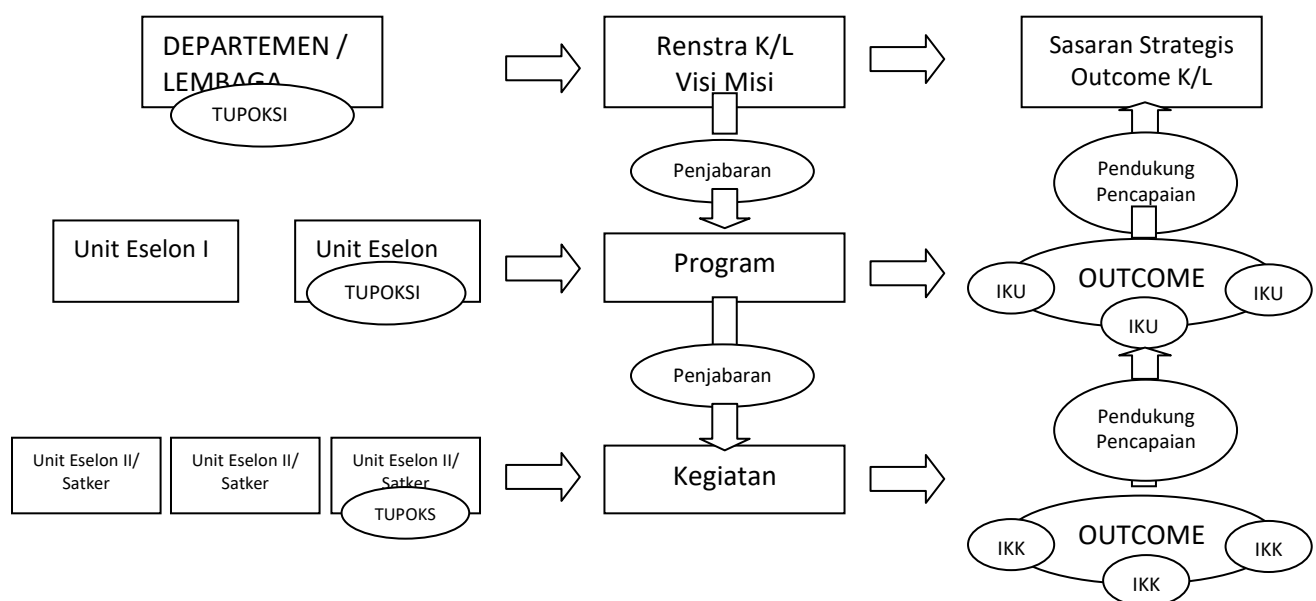
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi social dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran

yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Bila kita melihat kerangka penganggaran sekarang yang berbasis kinerja, maka dalam penganggaran berbasis kinerja ini memberikan peluang bagi pengintegrasian gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Berikut dapat dilihat kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja pada level Kemeterian/Lembaga dikutip dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009.

Diagram 1: Kerangka PBK Tingkat K/L



Berdasarkan kerangka PBK di atas, pada dasarnya akan mengubah focus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker). Kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada keluaran/hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran kinerja terdiri dari:

1. Indikator input: besarnya jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program.
2. Indikator output: unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.
3. Indikator outcome: yaitu perubahan pada keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat dari pelaksanaan jasa/pelayanan program.

Dari ketiga indikator pengukuran kerja di atas dapat diintegrasikan isu gender didalamnya sehingga dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender tidak hanya melihat hasil dari ketiga indikator, tetapi juga melihat bagaimana penggunaan anggaran itu diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam konteks STAIN, diharapkan hasil program atau kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat secara adil bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa baik perempuan maupun laki-laki. Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran, akan menghasilkan anggaran responsif gender.

Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
2. Anggaran kesetaraan gender, adalah anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat, dan control terhadap sumber daya.
3. Anggaran pelebagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelebagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (KPPPA, 2010)

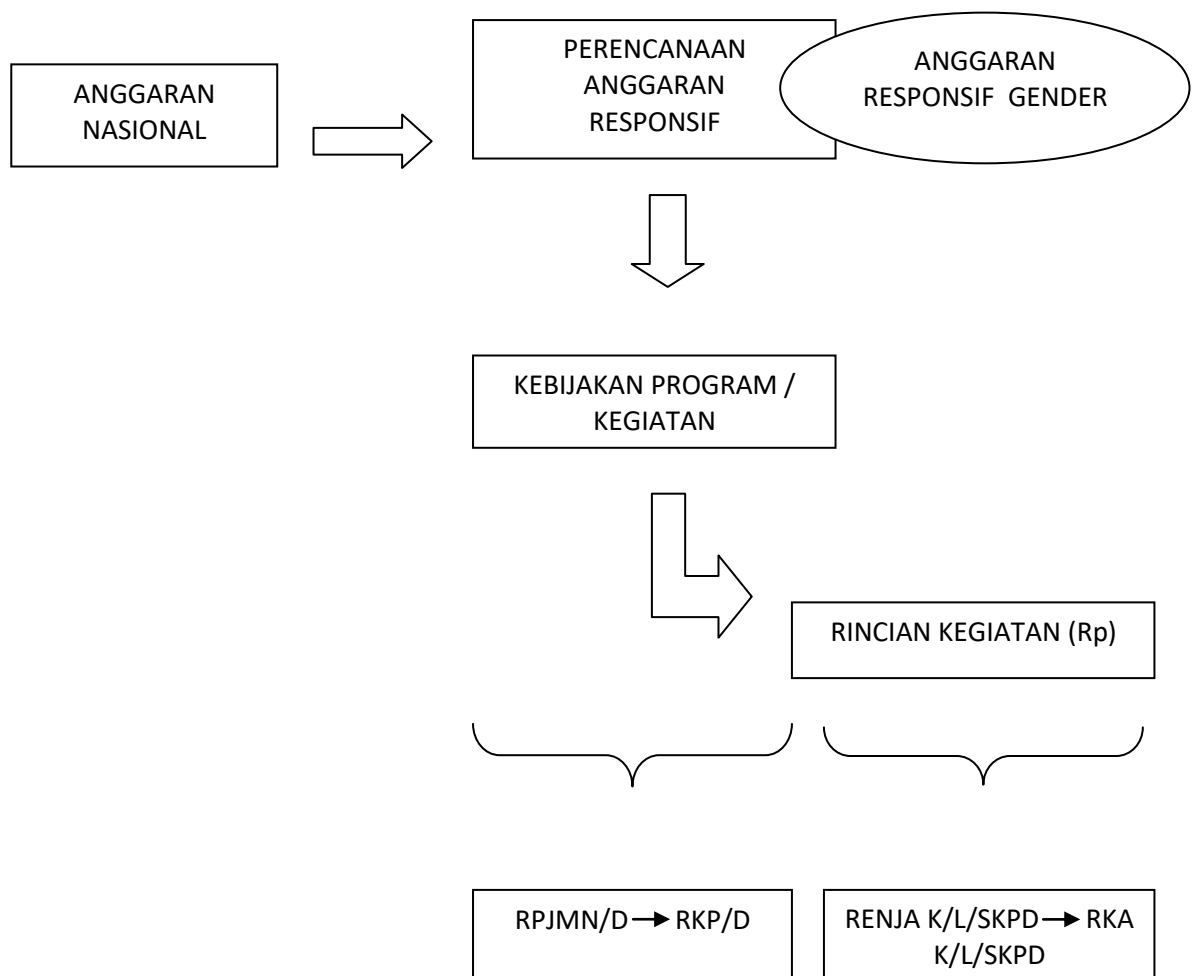
Selain pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dalam pengantar salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga juga ditambahkan pendekatan dengan pelaksanaan penganggaran responsif gender. Dalam pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan tentang pentingnya ARG dan Mekanisme Pengalokasian ARG dalam RKA-K/L. Pada halaman 71 dijelaskan bahwa:

“Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. ARG berada pada level output Kegiatan. Output yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan hendaknya telah melalui analisis gender sebelumnya. Untuk output yang terdapat isu gendernya, terdapat perbedaan dalam tata cara pendokumentasiannya. Namun demikian, meskipun dalam proses penyusunannya telah melalui analisis gender (antara lain menggunakan *Gender Analisis Pathway* atau GAP), tidak

semua output harus responsif gender karena terdapat juga output yang netral gender, salah satu contohnya adalah output Layanan Perkantoran.”

Berikut bagan alur anggaran responsive gender.

Diagram 2: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender



Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsive gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: Analisis gender; dan penyusunan GBS. Tahap Analisis gender dilakukan dengan menganalisis adanya isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti/alat

untuk menganalisis gender seperti model Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam tahap menganalisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh KPPPA menggunakan analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP). Piranti ini pula yang akan dilakukan penulis dalam menganalisis program kegiatan pada DIPA STAIN tahun 2011.

Dengan telah teridentifikasinya isu/kesenjangan gender yang ada pada level output kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen *Gender Budget Statement* (GBS).

Pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran, untuk output yang responsive gender, RKA-K/L yang diajukan harus dilampiri dengan GBS, yaitu dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsive terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
2. Tujuan Output Kegiatan
3. Analisis situasi
4. Rencana Aksi
5. Besar alokasi untuk pencapaian outputnya
6. Dampak/hasil output kegiatan
7. Penanda tangan GBS adalah penanggungjawab Kegiatan (Permenkeu, 2011)

Identifikasi Kebijakan dan Program Kegiatan STAIN Parepare

Identifikasi kebijakan, program, dan kegiatan di Perguruan Tinggi dimulai dengan mengidentifikasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) STAIN Parepare Tahun Anggaran 2011 yaitu Program Pendidikan Islam, yang terbagi dalam 3 kegiatan besar untuk mencapai Hasil (Outcome) yaitu Meningkatnya Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam. Ketiga kegiatan tersebut adalah:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam; indikator kinerja kegiatannya adalah:
 - a. APK PTAI
 - b. APM PTAI
 - c. Rasio kesetaraan gender
 - d. Jumlah Program Studi Baru per tahun
 - e. Prosentase prodi berakreditasi A
 - f. Prosentase Prodi berakreditasi B
 - g. Jumlah prodi yang melaksanakan kelas bertaraf Internasional
 - h. Jumlah Prodi yang berakreditasi Internasional
 - i. Jumlah PTAI yang memiliki Lab Sains bersertifikat ISO 17025
 - j. Prosentase PTAI yang memberikan akses internet dan e-jurnal
 - k. Prosentase HAKI/Paten yang dihasilkan PTAI
 - l. Jumlah PTAI berperingkat Top 200 - 500 versi THES
 - m. Prosentase lulusan program sarjana yang bekerja dalam waktu 1 tahun

- n. Jumlah UIN dengan basis Universitas riset (research university)
- o. Jumlah PTAI yang mempunyai kerjasama dengan dunia industry berbasis penelitian dan pengembangan
- p. Jumlah PTAI yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah berbasis penelitian dan kebijakan
- q. Jumlah PTAIN menjadi BHPP
- r. Jumlah PT AIS menjadi BHPM
- s. Prosentase PTAI yang bersertifikat ISO 9001;2008
- t. Prosentase Prodi yang memiliki ijin operasional dan berakreditasi
- u. Prosentase PTAIN yang laporan keuangannya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- v. Prosentase PTAI yang mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri
- w. Nilai total tertimbang medali dan kompetisi internasional.

Keluaran (Output) berupa:

- a. Perpustakaan PTAI yang dibangun
- b. Pengembangan kepada Masyarakat Berbasis program yang bermutu
- c. Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Islam yang memenuhi standar
- d. Penelitian yang bermutu

2. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu; Indikator Kinerja Kegiatan dan Keluaran (Output) nya adalah Mahasiswa miskin yang menerima Beasiswa.
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Islam; indikator Kinerja Keuatannya adalah:
 - a. Data dukung perencanaan Pendidikan Islam
 - b. Pengembangan Sistem Registrasi Data Pendidikan Berbasis Internet/ICT
 - c. Renstra Pendidikan Islam
 - d. Rencana Kerja Tahunan Pendidikan Islam
 - e. DIPA Pendidikan Islam
 - f. Kompetensi bendahara
 - g. Peringkat Laporan Keuangan
 - h. Laporan program Pendidikan Islam
 - i. Rasio pendaftar dan formasi pegawai Ditjen Pendidikan Islam
 - j. Frekuensi Diklat
 - k. Pendidikan berkelanjutan
 - l. Sertifikat keahlian
 - m. Pengisian jabatan
 - n. Rotasi pegawai
 - o. Kenaikan pangkat
 - p. Kualitas jaringan data kepegawaian
 - q. Paket analisis kebijakan
 - r. Kualitas pelayanan kelembagaan
 - s. Jenis SPO
 - t. Jenis SMP

- u. Tingkat capaian kinerja organisasi
- v. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan
- w. Kebersihan, kenyamanan, keamanan lingkungan kerja
- x. Sistem persuratan elektronik
- y. Keperluan sehari-hari perkantoran
- z. Operasional perkantoran
- aa. Kualitas pengelolaan BMN
- bb. Pencitraan Pendidikan Islam

Keluaran (Output) nya adalah:

- a. Layanan Perkantoran
- b. Dokumen Management dan Administrasi

Ketiga jenis kegiatan di atas, secara teknis tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Program Pendidikan Tinggi STAIN Tahun Anggaran 2011 yang terdiri atas beberapa jenis program kegiatan beserta besarnya dana yang dialokasikan pada setiap item program kegiatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih salah satu item kegiatan yang dianggap *representative* untuk dianalisis yaitu “Program Peningkatan kegiatan belajar mengajar Perguruan Tinggi Agama”. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan salah satunya adalah “Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah”. Besarnya alokasi dana untuk kegiatan ini sebanyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Analisis Kebijakan dan Program Kegiatan STAIN Parepare

Kegiatan “Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah” menjadi pilihan peneliti untuk dianalisis anggarannya dengan

pertimbangan; Jurusan Tarbiyah adalah jurusan yang paling banyak mahasiswanya dan paling banyak pula mahasiswa perempuannya. Dari data terpilah Sub-Bagian Akademik STAIN Parepare diperoleh data bahwa jumlah mahasiswa jurusan Tarbiyah Tahun Akademik 2011-2012 sebanyak 1.256 orang, terbagi atas mahasiswa laki-laki sebanyak 401 orang, sedangkan mahasiswa perempuan sebanyak 855 orang. (Data Sub-bagian Akademik: 2012) Ini berarti bahwa jumlah mahasiswa perempuan dua kali lipat dari jumlah mahasiswa laki-laki, sehingga diasumsikan adanya isu gender dalam kegiatan di Jurusan Tarbiyah.

Dari hasil depth interview dengan Ketua Jurusan Tarbiyah ditemukan bahwa alokasi anggaran untuk Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah digunakan untuk penyelenggaraan 2 sub-kegiatan yang keduanya dialokasikan untuk kegiatan mahasiswa Tarbiyah. Kedua kegiatan yang dimaksud adalah "Tarbiyah Award" dan "Kompetensi Minimal Akademik (KMA)". Menurut Ketua Jurusan Tarbiyah, kedua kegiatan ini menjadi kegiatan andalan jurusan yang dikhususkan kepada mahasiswa karena keduanya memberi ruang kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan mutunya sebagai mahasiswa Tarbiyah. Secara terpisah tujuan keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tarbiyah Award adalah kegiatan yang dibuka untuk seluruh mahasiswa jurusan Tarbiyah berfungsi untuk menciptakan iklim dan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi dibidang akademik, yang bertujuan melahirkan mahasiswa yang teridentifikasi cerdas. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam

rangka penentuan mahasiswa berprestasi pada setiap tahun akademik. (Laporan Kegiatan Tarbiyah).

Kompetensi Minimal Akademik adalah kegiatan evaluasi dan pembimbingan kompetensi minimal akademik yang berfungsi sebagai program pengidentifikasian kemampuan mahasiswa pada bidang-bidang tertentu. Bidang kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan minimal pada hal wawasan dan praktik keagamaan sehari-hari serta kemampuan dan wawasan dalam bidang teaching atau pembelajaran. Program ini ditujukan pada mahasiswa semester VII (tujuh) (Laporan Kegiatan Tarbiyah).

Pelaksanaan Tarbiyah Award untuk tahun anggaran 2011 menurut Ketua Jurusan dan Panitia pelaksana kegiatan, tidak berjalan maksimal (walaupun telah diinformasikan kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi) karena hanya diikuti oleh 3 kontestan (2 laki-laki dan 1 perempuan) dan yang berhasil meraih Tarbiyah Award 2011 adalah mahasiswa perempuan atas nama Nahliah. Sedangkan untuk kegiatan KMA tahun anggaran 2011 diikuti oleh 137 mahasiswa untuk seluruh semester VII (tujuh). Kegiatan ini berlangsung 2 tahap. Tahap pertama adalah tes kemampuan mahasiswa yang berlangsung selama 2 hari dan tahap kedua adalah kegiatan pembimbingan yang berlangsung selama 3 hari.

Dari hasil analisis GAP ditemukan bahwa tidak ada isu gender pada rumusan kebijakan yang dituangkan Ketua Jurusan Tarbiyah dari program "Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah" seperti yang terjabarkan pada RKAL STAIN menjadi kegiatan "Tarbiyah Award" dan "Kompetensi Minimal Akademik". Setelah dilakukan telaah pada formulasi kebijakan,

tujuan/sasaran kebijakan telah menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan mutu mahasiswa Tarbiyah baik laki-laki maupun perempuan menuju outcome yang tertuang dalam DIPA maupun RKAL STAIN: *Meningkatnya Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam*.

Dari data pembuka wawasan ditemukan bahwa tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada kegiatan Tarbiyah Award dan KMA. Panitia pelaksana membuka pendaftaran kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi pada kegiatan Tarbiyah Award. Ini berarti bahwa Panitia pelaksana member ruang/akses kepada seluruh mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan untuk berkompetisi dalam penganugrahan Tarbiyah Award. Walaupun diakui oleh panitia dan Ketua jurusan bahwa kegiatan ini tidak berjalan maksimal karena hanya diikuti oleh 3 orang kontestan. Pada Tarbiyah Award 2011 yang berhasil mendapatkan penganugrahan adalah mahasiswa perempuan atas nama Nahliah. Ini berarti bahwa para tim seleksi Tarbiyah Award menyeleksi mahasiswa berdasarkan kemampuan/skill yang diharapkan dan tidak terindikasi adanya bias gender. Sedangkan pada kegiatan KMA, panitia mewajibkan kepada seluruh mahasiswa semester VII (tujuh) yang berjumlah 137 mahasiswa ikut pada pembimbingan dimaksud untuk mencapai mutu jurusan. Ini berarti bahwa jurusan telah memberi akses, partisipasi, dan control kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan agar mendapatkan manfaat dari kegiatan KMA Jurusan.

Data dari mahasiswa setelah dilakukan depth interview juga menunjukkan tidak adanya kesenjangan gender pada kedua kegiatan tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka menerima

manfaat dari hasil kegiatan. Beberapa alasan yang dikemukakan mengenai ketidakterlibatan mereka pada Tarbiyah Award adalah kurangnya rasa percaya diri mereka untuk membuat makalah yang akan diperlombakan pada ajang kompetisi. Mereka juga menyatakan bahwa waktu untuk mempersiapkan makalah dirasa kurang, dan wawasan yang tidak luas untuk membahas tema yang telah ditentukan panitia.

Dari rumusan kebijakan dan data pembuka wawasan tidak ditemukan adanya kesenjangan gender pada program “Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah”. Program ini telah memberikan akses dan partisipasi kepada mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengguna pembangunan untuk ikut dan berpartisipasi secara aktif pada kedua kegiatan yang dimaksud. Program ini juga memberi control yang sama baik kepada mahasiswa perempuan maupun kepada mahasiswa laki-laki untuk mengambil bagian pada kegiatan Tarbiyah sehingga manfaatnya diharapkan akan melekat pada mereka sebagai mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing seperti yang diamanatkan oleh Outcome DIPA dan RKAL STAIN Parepare.

Karena tidak ditemukannya isu gender pada salah satu kebijakan yang tertuang dalam 2 kegiatan di jurusan Tarbiyah tahun anggaran 2011, dengan demikian peneliti mencari fenomena di lingkup STAIN yang netral gender ataupun bias gender sebagai pembuka wawasan dalam Focus Group Discussion. Pembangunan Masjid “Al-Wasilah” menjadi pilihan peneliti untuk dianalisis isu gendernya sebagai data pembuka wawasan dengan pertimbangan bahwa pembangunan masjid umumnya netral gender tanpa memperhatikan kebutuhan khusus perempuan sebagai pengguna

masjid. Atas dasar pertimbangan ini, peneliti berasumsi bahwa masjid "Al Wasilah" STAIN Parepare juga netral gender.

Komitmen Menuju Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Dari data FGD yang dilakukan oleh peneliti bersama stakeholder di restoran Dinasty pada tanggal 16 Oktober 2012, menghasilkan adanya komitmen bersama untuk melakukan perencanaan dan penganggaran responsive gender di lingkup STAIN Parepare untuk perencanaan penganggaran STAIN tahun 2014. Mereka menyadari bahwa ARG sangat sejalan dengan EMPA (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) yang harus segera dilaksanakan tahun anggaran 2013 mendatang sebagai alat untuk memonitoring efektifitas penggunaan anggaran negara. Bila EMPA melihat outcome kegiatan secara umum; seberapa besar efektifitas manfaat pembangunan kepada sasaran pembangunan, maka ARG melihat outcome yang sudah terpilah; berapa besar manfaat pembangunan untuk perempuan dan untuk laki-laki. Berikut adalah alur pelaksanaan FGD.

Sesi pertama FGD dimulai dengan pemaparan konsep-konsep ARG yang meliputi 3 bagian pokok:

1. Penyamaan persepsi peserta FGD tentang ARG
2. Data pembuka wawasan tentang anggaran yang netral dan bias gender
3. Komitmen menuju perencanaan dan penganggaran responsive gender.

Pada dasarnya para peserta FGD dapat memahami dengan mudah konsep ARG yang melekat pada setiap item anggaran, sesuai

yang diamanatkan Permenkeu setiap tahunnya tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Mereka juga memahami dengan baik isi aturan PMK di atas yang wajib untuk dilaksanakan, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana menjalankannya. Berdasarkan data pembuka wawasan yang dikemukakan peneliti tentang anggaran pembangunan masjid STAIN yang bias gender pada wilayah wudhu, para peserta FGD sepakat bahwa idealnya setiap pembangunan dimulai dari wilayah perencanaan untuk mempertimbangkan masukan-masukan keinginan dari semua unit sebelum pembangunan di mulai. Dan bahwa setiap gambar gedung yang akan dibangun harus dipaparkan dan disosialisasikan ke semua elemen kampus sebelum dimulai pembangunannya. Salah satu bentuk pembangunan yang bias gender juga dikemukakan oleh peserta FGD adalah pembangunan wall climbing di samping asrama putri. Hal ini tentu saja mengganggu aktifitas penghuni asrama yang dihuni oleh mahasiswa perempuan dan pemanjat tebing yang kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa laki-laki. mengingat wilayah privasi mereka tidak terjaga. Bila ARG dilakukan melalui analisis situasi sebelum pembangunan di mulai, maka hal yang seperti di atas tidak akan terjadi.

Penutup

Hasil kajian merekomendasikan 3 kebijakan yaitu:

1. Melaksanakan kembali raker pembahasan anggaran sebagai acuan renja STAIN menuju anggaran responsive gender. Dengan catatan pelaksanaan raker pembahasan anggaran bersifat terbatas, mengingat pengalaman raker-raker

sebelumnya yang dianggap tidak efektif. Tawaran pelaksanaan raker terbatas mengikuti pola: raker diikuti oleh perwakilan-perwakilan setiap unit di STAIN dengan membawa prioritas program masing-masing unit. Setiap program kegiatan yang diajukan berbasis kinerja, bahwa output kegiatan jelas nilai manfaatnya pada pengguna anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang telah disediakan.

2. Membentuk tim perumus independent yang akan bekerjasama dengan tim perencanaan STAIN dalam penyusunan dan penganggaran responsive gender. Tim ini secara garis besar bekerja dalam 3 tahap yaitu: tahap analisis situasi, tahap penyusunan kegiatan, dan tahap penyusunan indicator kinerja.
3. Pusat Studi Gender (PSG) sebagai salah satu unit di STAIN dan juga sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Perguruan Tinggi bertanggungjawab menyelenggarakan pelatihan ARG kepada stakeholder menuju perencanaan dan penganggaran DIPA STAIN yang responsive gender.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Hasil Rekomendasi Rakor PUG Tahun 2009*. www.menegpp.go.id. Akses 20 Desember 2010.
- Darwin, Muhadjir dan Kusumasari, Bevaola, 2002. *Sesitivitas Gender pada Birokrasi Publik* Artikel pada Policy Brief No 09/PB/2002. Yogyakarta: CPPS Universitas Gadjah Mada.
- Jurusan Tarbiyah, 2011. *Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Jurusan Tarbiyah*. Parepare: Jurusan Tarbiyah STAIN Parepare.

- Kementerian Keuangan RI, 2011. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011* No. 3584/025-04.2.01/23/2011.
- Kementerian PP-PA RI. 2010. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Menteri Keuangan RI, 2011. *Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Nugroho D. Rianth. 2002. *Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia (Evaluasi pada Kebijakan, Organisasi, Pendidikan dan Mekanisme)*. Yogyakarta: Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Thesis unpublished)
- Program Pendidikan Tinggi STAIN Parepare, 2011. *Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2011*.
- Surbakti, Soedarti, et.al. *Pemetaan dan Penyempurnaan Alur Data untuk Pemantauan Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium Indonesia*, BPS.